



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**





**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**



**BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 – 429451**

KATA PENGANTAR


Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 3 Agustus 2022
Kepala BKAD Kota Pekalongan,


Drs. R DOYO BUDI WIBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631111 198902 1 005

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPKAD Kota Pekalongan	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	31
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	48
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	48
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	49
3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	66
4.1 Rencana Kerja	66
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	67
BAB V PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumusan rancangan awal Renja merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 teknokratis dan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahapan perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RKPD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 merupakan Dokumen Rencana dengan wawasan satu tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) harus memperhatikan seluruh perubahan sosial, politik, dan ekonomi serta menjadikan hasil evaluasi perencanaan tahun sebelumnya sebagai referensi.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan tahunan pemerintah daerah, sehingga dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang berisikan Program dan Kegiatan yang disusun lebih menekankan kepada Pengelolaan Keuangan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023, tentunya program dan kegiatan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Pekalongan yang mengusung visi Kota Pekalongan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah terwujud sebagai manifestasi daripada materi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu di dalam Prioritas Kinerja

Pembangunan Kota Pekalongan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan maupun Renstra Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Disamping itu, Renja yang disusun ini telah disinkronisasi dengan acuan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” sebagai Sesanti

- Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021-2026;
 29. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
 30. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak kepentingan baik internal maupun eksternal lingkup kedinasan maupun tingkat Kota Pekalongan dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja Tahun yang akan datang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan 2021-2026. Serta sebagaian acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2023.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dengan pembandingan Renja Tahun sebelumnya maupun Tahun yang akan datang;
4. Pedoman dalam menyusun dokumen rencana agenda pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Tahun 2023;
5. Penetapan Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Keuangan Dearah Kota Pekalongan yang direncanakan dalam pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD yang berisi latar belakang penyusunan rencana kerja, landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan rencana kerja, penjelasan mengenai maksud dan tujuan, serta sistematika bahasaan tiap bab dalam Renja PD.

BAB 2 HASIL EVALUSASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisikan tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah,, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisikan tentang Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Tujuan

dan sasaran renja perangkat daerah dan Program dan Kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, berisikan rencana kerja kegiatan, capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra PD dan pagu program dan kegiatan.

BAB 5 PENUTUP, berisikan uraian penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BPKAD Kota Pekalongan

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam menjalankan tugasnya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah sebagaimana pada Tabel dibawah di ini

Tabel 2.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	indeks	90	94,5	105
2	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	indeks	85	84,82	99,79
3	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	persen	100%	100%	100
4	Persentase Peningkatan PAD	persen	10%	34,67%	669,8

Dari tabel tersebut dapat diketahui capaian indikator kinerja utama pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja pada indikator nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian 105%. Capaian pada indikator ini melebihi/melampaui target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja pada indikator nilai evaluasi LKjIP (AKIP) dengan capaian kinerja 99,79%. Capaian pada indikator ini belum melebihi/melampaui target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja pada indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas dengan capaian kinerja 100%. Capaian pada indikator ini terpenuhi atau sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja 669,8%. Capaian pada indikator ini melebihi/melampaui target yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja utama pada Badapr Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Faktor pendukung:

- Komitmen dari semua elemen dari kepala kepala daerah hingga staf penyusun LK OPD.
- Adanya Reward dan punishment yang tegas
- Adanya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali
- Sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah
- Adanya asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran
- Pemasang alat perekam transaksi para wajib data (tapping box)
- Telah dilakukannya pemutahiran data PBB secara bertahap disemua kecamatan.
- Kemudahan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan peningkatan fungsi pembayaran pada masing-masing payment point dan kantor kas
- Dilakukannya pemeriksaan Pajak Daerah
- Makin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak
- Makin optimalnya kegiatan Verifikasi BPHTB

Faktor penghambat :

- Pergantian Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, Pengurus Barang

Daerah.

- Belum terintegrasinya SIM Pendapatan, Keuangan dan Aset.
- Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah
- Belum terintergrasinya pengawasan kinerja pelayanan (sesuai SOP) dengan teknologi. Selama ini penilaian kinerja masih berdasarkan kegiatan harian
- Belum optimalisnya kinerja perangkat daerah
- Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Kurangnya jumlah pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan sehingga sedikit menghambat kelancaran pelaksanaan tugas;
- Kurangnya kualitas teknis sebagian pegawai dalam mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

Untuk melihat capaian kinerja baik secara terperinci tersaji dalam tabel 2.1.2 dibawah ini :

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
BPKAD Kota Pekalongan

No	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Keuangan										
1	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	Persen	4,5	-	22,73	4,5	26,09	26,09	505,15	Tercapai
-	Jumlah WP/ WR yang dilayani	WP/WR	2500	49	19.485	6.000	6.142	6.142	102,37	Tercapai
-	Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD)	surat	9000	91121	9.387	19.000	19.596	19.596	103,14	Tercapai
-	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun	Buku	0	-	1	4	4	4	100,00	Tercapai
-	Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun	Buku	0	-	93	94	94	94	100,00	Tercapai
-	Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan	berkas	2000	2762	2.963	2.000	2.859	2.859	142,95	Tercapai
-	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	laporan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
-	Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan	kali	6	6	6	6	6	6	100,00	Tercapai
-	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	-	1	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
-	Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan	Aplikasi	4	-	14	8	8	8	100,00	Tercapai
-	Jumlah sistem informasi baru yang diadakan	Aplikasi	0	0	0	2	2	2	100,00	Tercapai
-	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	Lembar	92000	86500	95.680	93.000	95.019	95.019	102,17	Tercapai
-	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata	Objek	2000	2523	2.000	1.500	1.500	1.538	100,00	Tercapai
-	Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun	Buku	10	-	1	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
-	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	Objek Pajak	0	0	0	1.140	1.140	1.140	100,00	Tercapai
2	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	Persen	64,5	-	37,82	64,5	63,9	63,9	99,07	Tercapai
3	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	Persen	100	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai
4	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	Persen	100	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai
-	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	buku	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
-	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun	buku	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai

No	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
							Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	1	2	2	2	2	100,00	Tercapai
	-	Jumlah Sertifikat yang diajukan	bidang	32	139	282	750	750	750	100,00	Tercapai
	-	Jumlah Patok batas tanah yang diadakan	patok	55	600	600	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
	-	Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan	kali	5	5	5	5	5	5	100,00	Tercapai
	-	Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	OPD	35	58	60	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
		Jumlah laporan/data BMD dan barang persediaan yang disusun	laporan	0	0	0	79	79	79	100,00	Tercapai
	-	Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	Unit Kerja	36	72	72	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
	-	Jumlah laporan/data pengelolaan BMD	Laporan	67	67	67	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
	-	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	jenis	3	3	3	3	4	4	133,33	Tercapai
	-	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	unit	5	5	14	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
	-	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang / berat	unit	1	1	1	1	1	1	100,00	Tercapai
	-	"Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	unit	3	3	0	3	1	1	66,66	indikator yang dianalisis terbalik karena indikator ini untuk mengukur pemeliharaan karena insidental..jika tidak digunakan (capaian Nol) = Tingkat

No	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										kinerja 100 %
5	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	Persen	100	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai
6	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	Persen	100	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
	- Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	4	4	4	4	4	4	100,00	Tercapai
	- Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
	- jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	4	4	4	4	4	4	100,00	Tercapai
	- Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun	dokumen	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
	- Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	kali	2	12	2	2	2	2	100,00	Tercapai
	- Jumlah pelaksanaan asistensi RKA	OPD/Unit Kerja	66	67	67	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
	- Jumlah pelaksanaan asistensi RKA	kali	0	0	0	2	2	2	100,00	Tercapai
	- Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	kali	6	6	6	16	16	16	100,00	Tercapai
	- Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	dokumen	0	0	0	2	2	2	100,00	Tercapai
	- Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	dokumen	0	0	0	2	2	2	100,00	Tercapai
7	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	Persen	100	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai
	- Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	Laporan	14	14	14	14	14	14	100,00	Tercapai
	- Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	OPD	67	12 bulan	67	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
	- Jumlah pendampingan pemanfaatan SIMRAL yang dilaksanakan	kali	1	-	1	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
	- Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan	PD/Unit Kerja	67	66	67	0	0	0		Indikator sudah tidak digunakan
	- Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun	laporan	6	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
	- Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun	dokumen	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai

No	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Jumlah publikasi laporan keuangan	kali	1	-	1	1	1	1	100,00	Tercapai
-	Jumlah pembinaan/desk/rekonsiliasi laporan keuangan BLUD yang dilaksanakan triwulanan	kali	0	0	0	10	10	10	100,00	Tercapai
-	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan triwulanan	kali	0	0	0	4	4	4	100,00	Tercapai
-	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yg disusun	laporan	0	0	0	16	16	16	100,00	Tercapai
-	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Dana Blud yg disusun	laporan	0	0	0	16	16	16	100,00	Tercapai
-	Jumlah laporan dana bergulir yang disusun	laporan	0	0	0	4	4	4	100,00	Tercapai
8	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	Persen	100	-	100	100	100	105,79	100,00	Tercapai
9	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	Persen	100	-	100	100	100	134,06	100,00	Tercapai
-	Jumlah surat tagihan/surat pemberitahuan pembayaran/surat peringatan yang diterbitkan	surat	25000	50 persen	6196	4.000	5486	5486	137,15	Tercapai
-	Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	kali	1	300 wp/wr	1	1	1	1	100,00	Tercapai
-	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Reklame, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Pajak	kali	50	50	50	50	388	388	776,00	Tercapai
-	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	berkas	1500	1986	1887	1.500	2588	2588	172,53	Tercapai
-	Jumlah Objek Pajak/WP yang diperiksa	OP/WP	12	50	8	75	180	180	240,00	Tercapai
10	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	Persen	100	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai
11	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	Persen	100	-	100	100	100	100	100,00	Tercapai
-	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	sisdur	1	1	1	1	1	1	100,00	Tercapai
-	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	kali	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah laporan kerugian daerah yang disusun	kali	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	kali	12	6 bulan	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah laporan DAK per bidang yang disusun	laporan	2	4 triwulan	2	2	2	2	100,00	Tercapai
-	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	kali	300 orang	300 orang	1	1	1	1	100,00	Tercapai
-	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	data	3200	3200	3299	3120	3130	3130	100,32	Tercapai
-	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	kali	13	12	13	14	14	14	100,00	Tercapai
-	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	PD/Unit Kerja	66	67	67	80	80	80	100,00	Tercapai
-	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	dokumen	0	0	0	3	3	3	100,00	Tercapai
-	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	kali	4	-	4	4	4	4	100,00	Tercapai
Usuran Rutin										

No	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
-	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	11	12	11	11	11	11	100,00	Tercapai
-	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	orang/kali	550	498	453	300	384	384	128,00	Tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
-	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	1	1	1	1	1	100,00	Tercapai
-	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	30	49	42	47	38	38	80,85	Belum Tercapai
-	Jumlah gedung kantor yang ter rehabilitasi sedang/berat	unit	1	1	1	1	1	1	100,00	Tercapai
-	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	19	53	68	39	57	57	146,15	Tercapai
-	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	100,00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100,00	Tercapai
-	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	dokumen	6	14	6	6	6	6	100,00	Tercapai
-	Jumlah dokumen RKA , LAKIP dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	laporan	6	6	6	6	6	6	100,00	Tercapai
-	Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana	dokumen	6	0	6	6	6	6	100,00	Tercapai

No	Indikator Urusan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Kondisi Kinerja pada Awal	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		Realisasi Capaian Renstra sd 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir Renstra 2016 - 2021
						Target Perubahan Renja 2021	Realisasi Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Aksi; LKJIP) dan Laporan Laporan Keuangan SKPD yang disusun									
-	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	-	12	12	12	12	100,00	Tercapai
-	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	0	-	5	5	5	5	100,00	Tercapai
4	Pengaduan yang diterima	kasus	0	0	0	0	0	0	100,00	Tercapai
-	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	orang/bulan	12	12	1	1	1	1	100,00	Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan beberapa aspek/ fokus sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan dengan diperolehnya opini WTP, Penetapan Peraturan APBD yang tepat waktu dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			85	90	85,2 5	85,5	455	94,5	900	85,5	
2	Nilai LKjIP (AKIP)			82,5	85	83,5	84,5	81,12	84,82	85	84,5	
3	Pelaporan Keuangan Daerah yang berkualitas			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan PAD			10	10			151,22	34,67			
5	Rasio PAD					1,95	1,98	2,12	1,95	1,95	1,98	

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah dokumen renja yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah dokumen renstra yang disusun			1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		
	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
2	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
3	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota			2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	0 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
4	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			27 unit	15 unit	15 unit	15 unit	47 unit	15 unit	7 unit	7 unit	
	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman			11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	11 bulan	
	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah			200 orang/ kali	200 orang/ kali	200 orang/ kali	200 orang/ kali	384 orang/ kali	200 orang/ kali	200 orang/ kali	200 orang/ kali	
5	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan			0 unit	7 unit	3 unit	0 unit	0 unit	0 unit	7 unit	3 unit	
	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan			2 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	15 unit	
	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan			0 unit	60 unit	20 unit	0 unit	0 unit	0 unit	60 unit	1 unit	
6	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah bulan penyediaan jasa			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kebersihan dan peralatan kebersihan kantor											
7	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala			47 unit	47 unit	47 unit	47 unit	38 unit	47 unit	38 unit	38 unit	
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)		V	11,91 Persen	8,33 Persen	8,08 Persen	7,66 Persen	11,91 Persen	8,33 Persen	8,08 persen	8,08 persen	
9	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan			2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
	Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
	Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	raperwal / perwal di Kota Pekalongan											
	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan			16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	16 kali	
10	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan			67 OPD	67 OPD	67 OPD	67 OPD		67 OPD	81 OPD	81 OPD	
	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	
	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun			30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	
	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai			2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan			3120 data SPT tahunan	3120 data SPT tahunan	3120 data SPT tahunan	3120 data SPT tahunan	3130 data SPT tahunan	3120 data SPT tahunan	3300 data SPT tahunan	3300 data SPT tahunan	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan			14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	13 kali	14 kali	14 kali	14 kali	
	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah			3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
11	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan			7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	
	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD			68 laporan	68 laporan	68 laporan	68 laporan	68 laporan	68 laporan	68 laporan	68 laporan	
	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun			13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	
	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun			7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	
	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan			5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun									4 laporan	4 laporan	
	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan									4 kali	4 kali	
	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan BLUD									16 laporan	16 laporan	
12	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah bulan penyediaan dana BTT			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
13	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset		v	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)											
14	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah buku standar harga yang disusun			2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah			2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah pengajuan sertifikat			800 bidang	800 bidang	78 bidang	20 bidang	750 bidang	800 bidang	250 bidang	20 bidang	
	Jumlah papan nama aset			55 buah	55 buah	55 buah	55 buah	55 buah	55 buah		55 buah	
	Jumlah patok batas tanah			600 patok	600 patok	600 patok	600 patok	0 patok	600 patok		600 patok	
	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD			3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	
	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi sedang/berat			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	terpelihara secara rutin/berkala											
	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat			3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1 unit	3 unit	4 unit	4 unit	
	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok			5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	
	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan			65 laporan	65 laporan	65 laporan	65 laporan	79 laporan	65 laporan	80 laporan	80 laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									80 Laporan	80 Laporan	
	Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan			30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	0 OPD	30 OPD	80 OPD	80 OPD	
	Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan			35 unit kerja	35 unit kerja	35 unit kerja	35 unit kerja	0 unit kerja	35 unit kerja	80 unit kerja	80 unit kerja	
15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)		v	0,05 Persen	0,05 Persen	0,05 Persen	0,05 Persen	32,88 Persen	0,05 Persen	0,05 persen	0,05 persen	
16	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak			4,6 persen	4,6 persen	4,7 persen	4,8 persen	22,73 persen	4,6 persen	4,7 persen	4,7 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi			100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	118,05 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	
	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
	Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
	Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		
	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata			1500 objek	1500 objek	1500 objek	1500 objek	1536 objek	1500 objek	1500 objek	1500 objek	
	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring			1140 objek	1140 objek	1140 objek	1140 objek	1140 objek	1140 objek	1140 objek	1140 objek	
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sistem informasi baru yang diadakan			3 aplikasi	1 aplikasi	0 aplikasi	0 aplikasi	2 aplikasi	0 aplikasi			
	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan			8 aplikasi	8 aplikasi	8 aplikasi	8 aplikasi	8 aplikasi	8 aplikasi	8 aplikasi	8 aplikasi	
	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan			2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas	2859 berkas	2000 berkas	2000 berkas	2000 berkas	
	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun			94 buku	94 buku	94 buku	94 buku	94 buku	94 buku	94 buku	94 buku	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021			4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	
	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate			9300 objek	8000 objek	8000 objek	8000 objek	0 objek	8000 objek	8000 objek	8000 objek	
	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan			93000 lembar	93000 lembar	93000 lembar	93000 lembar	95019 lembar	93000 lembar	94000 lembar	94000 lembar	
	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat			19000 lembar	19000 lembar	19000 lembar	19000 lembar	19596 lembar	19000 lembar	19000 lembar	19000 lembar	
	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota			1 orang/bulan	1 orang/bulan	1 orang/bulan	1 orang/bulan	1 orang/bulan	1 orang/bulan	1 orang/bulan	1 orang/bulan	
	Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani			14400 WP/WR	14400 WP/WR	14400 WP/WR	14400 WP/WR	6142 WP/WR	14400 WP/WR	14400 WP/WR	14400 WP/WR	
	Jumlah berkas BPHTB yang diteliti dan diverifikasi			1500 berkas	1500 berkas	1500 berkas	1500 berkas	2588 berkas	1500 berkas	2000 berkas	2000 berkas	
	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan			3060 surat	3060 surat	3060 surat	3060 surat	5486 surat	3060 surat	3060 surat	3060 surat	
	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah			50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	388 kali	50 kali	50 kali	50 kali	
	Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah			8 wajib pajak	8 wajib pajak	8 wajib pajak	8 wajib pajak	180 wajib pajak	8 wajib pajak	8 wajib pajak	8 wajib pajak	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan dalam rangka menselaraskan kebutuhan perangkat daerah dengan kemampuan daerah.

Proses penyesuaian antara analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD menyebabkan adanya perubahan rumusan program dan kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.4.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.2	KEUANGAN				25.265.693.000	KEUANGAN				27.136.267.000	
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	15.933.966.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	16.546.686.000	
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
			Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
5.2.1.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	18.150.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	16.000.000	
5.2.1.2.0 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	4.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 dokumen	2.500.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen renstra yang disusun	1 dokumen							
5.2.1.2.0 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 dokumen	1.500.000	
5.2.1.2.0 1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	11.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan	12.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokumen		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2 dokumen			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	2 dokumen		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen		
5.2.1.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	12.517.843.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	12.846.334.000	
5.2.1.2.0 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12.380.593.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12.709.084.000	
5.2.1.2.0 2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	135.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	135.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.2.0 2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	2.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen	2.250.000	
5.2.1.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	9.500.000	
5.2.1.2.0 5.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	9.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	2 kali	9.500.000	
5.2.1.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	786.868.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	811.868.000	
5.2.1.2.0 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7.500.000	
5.2.1.2.0 6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	273.868.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan	273.868.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 unit			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 unit		
5.2.1.2.0 6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	18.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	18.000.000	
5.2.1.2.0 6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	110.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	110.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.1.2.0 6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	50.000.000	
5.2.1.2.0 6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	2.500.000	
5.2.1.2.0 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	200 orang/ kali	325.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	200 orang/ kali	350.000.000	
5.2.1.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.608.060.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.455.000.000	
5.2.1.2.0 7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan	3 unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan	3 unit	1.200.000.000	
5.2.1.2.0 7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan	15 unit	608.060.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan	15 unit	255.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan	1 unit			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan	1 unit		
5.2.1.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	718.736.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	718.736.000	
5.2.1.2.0 8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	3.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							an				
5.2.1.2.0 8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	506.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	506.400.000	
5.2.1.2.0 8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	209.336.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan	209.336.000	
5.2.1.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	274.809.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	689.248.000	
5.2.1.2.0 9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	38 unit	134.809.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	38 unit	149.248.000	
5.2.1.2.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 unit	500.000.000	
5.2.1.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	40.000.000	
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,08 persen	6.213.280.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,08 persen	6.921.134.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(IKK Outcome)					(IKK Outcome)			
5.2.2.2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen	1.029.995.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen	1.237.850.000	
5.2.2.2.0 1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	1 dok	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	1 dok	35.000.000	
5.2.2.2.0 1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	1 dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	1 dokumen	35.000.000	
5.2.2.2.0 1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	2 dokumen	62.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	2 dokumen	62.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	2 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	2 kali		
5.2.2.2.0 1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	4 dokumen	728.297.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	4 dokumen	890.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	2 dokumen			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	2 dokumen		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.2.2.0 1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kota Pekalongan	Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	4 dokumen	143.698.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kota Pekalongan	Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	4 dokumen	124.600.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	2 dokumen			BPKAD Kota Pekalongan	Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	2 dokumen		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	1 kali		
5.2.2.2.0 1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	12 bulan	26.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	12 bulan	91.250.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	16 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	16 kali		
5.2.2.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen	267.740.600	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen	267.740.000	
5.2.2.2.0	Koordinasi dan	BPKAD	Jumlah dokumen	81 OPD	89.149.000	Koordinasi dan	BPKAD	Jumlah dokumen	81 OPD	89.149.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekalongan	SP2D yang diterbitkan dan dicairkan			Pengelolaan Kas Daerah	Kota Pekalongan	SP2D yang diterbitkan dan dicairkan			
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	3 dokumen			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	3 dokumen		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12 kali		
5.2.2.2.0 2.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	30 laporan	23.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	30 laporan	23.000.000	
5.2.2.2.0 2.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	2 kali	25.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	2 kali	25.000.000	
5.2.2.2.0 2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3300 data SPT tahunan	73.591.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	3300 data SPT tahunan	73.591.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	14 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	14 kali		
5.2.2.2.0 2.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1 dokumen	25.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun	1 dokumen	25.000.000	
5.2.2.2.0 2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	3 kali	32.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	3 kali	32.000.000	
5.2.2.2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen	415.544.400	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen	415.544.000	
5.2.2.2.0 3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	7 laporan	59.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	7 laporan	59.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	68 laporan			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	68 laporan		
5.2.2.2.0 3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan	BPKAD Kota	Jumlah laporan realisasi anggaran	13 laporan	8.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan	BPKAD Kota	Jumlah laporan realisasi anggaran	13 laporan	8.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pekalongan	dan prognosis yang disusun			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pekalongan	dan prognosis yang disusun			
5.2.2.2.0 3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	7 laporan	95.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	7 laporan	95.000.000	
....		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	5 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	5 kali		
5.2.2.2.0 3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2 dokumen	90.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2 dokumen	90.000.000	
....		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 kali		
5.2.2.2.0 3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12 laporan	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	12 laporan	10.000.000	
5.2.2.2.0	Penyusunan Kebijakan	BPKAD	Jumlah dokumen	1 dokum	20.000.000	Penyusunan Kebijakan	BPKAD	Jumlah dokumen	1 dokum	20.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9	dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan	kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	en		dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Pekalongan	kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	en		
5.2.2.2.0 3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun	4 laporan	133.544.400	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun	4 laporan	133.544.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan	4 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan	4 kali		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan BLUD	16 laporan			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan BLUD	16 laporan		
5.2.2.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen	4.500.000.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen	5.000.000.000	
5.2.2.2.0 4.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan dana BTT	12 bulan	4.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah bulan penyediaan dana BTT	12 bulan	5.000.000.000	
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	1.355.497.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	1.505.497.000	
5.2.3.2.0	Pengelolaan Barang		Persentase OPD yang	100	1.355.497.000	Pengelolaan Barang		Persentase OPD	100	1.505.497.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Milik Daerah		menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	persen		Milik Daerah		yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	persen		
5.2.3.2.0 1.1	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah buku standar harga yang disusun	2 buku	55.000.000	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah buku standar harga yang disusun	2 buku	55.000.000	
5.2.3.2.0 1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2 buku	30.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	2 buku	30.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		
5.2.3.2.0 1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pengajuan sertifikat	250 bidang	305.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pengajuan sertifikat	250 bidang	455.000.000	
5.2.3.2.0 1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	3 jenis	65.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	3 jenis	65.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan		
5.2.3.2.0 1.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terhabilitasi sedang/berat	1 unit	325.480.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terhabilitasi sedang/berat	1 unit	325.480.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	4 unit			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	4 unit		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	5 kali		
5.2.3.2.0 1.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	80 laporan	575.017.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan	80 laporan	575.017.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	80 Laporan			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	80 Laporan		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan	80 OPD			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan	80 OPD		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan	80 unit kerja			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan	80 unit kerja		
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	0,05 persen	1.762.950.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	0,05 persen	2.162.950.000	
5.2.4.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase peningkatan potensi	4,7 persen	1.762.950.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase peningkatan potensi	4,7 persen	2.162.950.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pendapatan pajak					pendapatan pajak			
			Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	100 persen				Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	100 persen		
5.2.4.2.0 1.2		BPKAD Kota Pekalongan				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	85.000.000	Usulan Sub Kegiatan Baru
5.2.4.2.0 1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun	2 dokumen	184.992.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan Gebyar Pajak Daerah yang dilaksanakan	2 kali	184.992.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan	1 kali			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disusun	12 laporan		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	12 laporan			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan pajak dan retribusi	4 kali		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	6 kali							
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan	3 kali							
5.2.4.2.0 1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	1500 objek	30.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	1500 objek	30.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	1140 objek			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	1140 objek		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.4.2.0 1.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	8 aplikasi	55.941.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	8 aplikasi	355.941.000	
5.2.4.2.0 1.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	2000 berkas	353.100.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	2000 berkas	353.100.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	94 buku			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	94 buku		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021	4 buku			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021	4 buku		
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	8000 objek			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	8000 objek		
5.2.4.2.0 1.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan	94000 lembar	300.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan	94000 lembar	300.000.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	19000 lembar			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	19000 lembar		
5.2.4.2.0 1.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1 orang/bulan	386.348.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	1 orang/bulan	386.348.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	14400 WP/ WR			BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	14400 WP/ WR		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							an				
5.2.4.2.0 1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah berkas BPHTB yang diteliti dan diverifikasi	2000 berkas	65.388.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah berkas BPHTB yang diteliti dan diverifikasi	2000 berkas	65.388.000	
5.2.4.2.0 1.11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	3060 surat	227.681.000	Penagihan Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	3060 surat	227.681.000	
5.2.4.2.0 1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	50 kali	159.500.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	50 kali	159.500.000	
		BPKAD Kota Pekalongan	Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	8 wajib pajak			BPKAD Kota Pekalongan	Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	8 wajib pajak		
						Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0 Laporan	15.000.000	Usulan Sub Kegiatan Baru

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi dan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari ketujuh Prioritas Nasional di atas, terdapat beberapa sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan sasaran kinerja BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

- a. Sasaran ke 2 untuk PN 1 adalah Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB.
- b. Sasaran ke 4 untuk PN 7 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BPKAD Kota Pekalongan, ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Peran serta BPKAD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif berkualitas transparan dan akuntabel transparan pemerintahan yang akuntabel berbasis teknologi informasi.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BPKAD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BPKAD Kota Pekalongan adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BPKAD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun

selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BPKAD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
2. Pencapaian SDGs

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikelola Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dengan pertimbangan dua faktor tersebut diatas antara lain :

A	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
III	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
IV	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- V Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- VI Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VII Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B Program PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
- VIII Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
- 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3 Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

- 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

IX Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- 3 Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 5 Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 6 Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

X Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

- | | | |
|------------|-----------------|--|
| 2 | Sub Kegiatan | Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran |
| 3 | Sub Kegiatan | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
| 4 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota |
| 5 | Sub Kegiatan | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Kerugian Daerah |
| 6 | Sub Kegiatan | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah |
| 7 | Sub Kegiatan | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota |
| XI | Kegiatan | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak |
| C | Program | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH |
| XII | Kegiatan | Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan Standar Harga |
| 2 | Sub Kegiatan | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah |
| 3 | Sub Kegiatan | Pengamanan Barang Milik Daerah |
| 4 | Sub Kegiatan | Penilaian Barang Milik Daerah |
| 5 | Sub Kegiatan | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah |
| 6 | Sub Kegiatan | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah |

D	Program	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
XIII	Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1	Sub Kegiatan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
2	Sub Kegiatan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3	Sub Kegiatan	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4	Sub Kegiatan	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5	Sub Kegiatan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6	Sub Kegiatan	Penetapan Wajib Pajak Daerah
7	Sub Kegiatan	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8	Sub Kegiatan	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
9	Sub Kegiatan	Penagihan Pajak Daerah
10	Sub Kegiatan	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
11	Sub Kegiatan	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Secara rekapitulasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengelola 4 (empat) Program, 13 (dua belas) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan.

Tabel 3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5.2	KEUANGAN				27.136.267.000		23.182.915.000
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	16.546.686.000		14.344.890.000
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		100 persen			
5.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	16.000.000		18.150.000
5.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	2 dokumen	2.500.000	DAU	4.700.000
5.2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	2 dokumen	1.500.000	DAU	2.250.000
5.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	12.000.000	DAU	11.200.000
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	4 dokumen		DAU	
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	2 dokumen		DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	5 dokumen		DAU	
5.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	12.846.334.000		12.591.960.000
5.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	12.709.084.000	DAU	12.454.710.000
5.2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	135.000.000	DAU	135.000.000
5.2.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	1 dokumen	2.250.000	DAU	2.250.000
5.2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	9.500.000		9.500.000
5.2.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota	BPKAD Kota Pekalongan	2 kali	9.500.000	DAU	9.500.000
5.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	811.868.000		754.082.000
5.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	7.500.000	DAU	7.500.000
5.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	273.868.000	DAU	241.082.000
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPKAD Kota Pekalongan	7 unit		DAU	
5.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	18.000.000	DAU	18.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	BPKAD Kota Pekalongan	11 bulan	110.000.000	DAU	110.000.000
5.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	50.000.000	DAU	50.000.000
5.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	2.500.000	DAU	2.500.000
5.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	BPKAD Kota Pekalongan	200 orang/ kali	350.000.000	DAU	325.000.000
5.2.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 persen	1.455.000.000		-
5.2.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan	BPKAD Kota Pekalongan	3 unit	1.200.000.000	DAU	-
5.2.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan	BPKAD Kota Pekalongan	15 unit	255.000.000	DAU	-
		Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan	BPKAD Kota Pekalongan	1 unit		DAU	
5.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	718.736.000		720.913.000
5.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	3.000.000	DAU	3.000.000
5.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	506.400.000	DAU	506.400.000
5.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	209.336.000	DAU	211.513.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	689.248.000		250.285.000
5.2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	BPKAD Kota Pekalongan	38 unit	149.248.000	DAU	135.285.000
5.2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	BPKAD Kota Pekalongan	1 unit	500.000.000	DAU	75.000.000
5.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor		12 bulan	40.000.000		40.000.000
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)		8,08 persen	6.921.134.000		6.083.042.000
5.2.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu		100 persen	1.237.850.000		924.853.600
5.2.2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	1 dok	35.000.000	DAU	35.000.000
5.2.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	1 dokumen	35.000.000	DAU	35.000.000
5.2.2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	2 dokumen	62.000.000	DAU	62.000.000
		Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan	BPKAD Kota Pekalongan	2 kali		DAU	
5.2.2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	4 dokumen	890.000.000	DAU	628.699.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
		Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan	BPKAD Kota Pekalongan	2 dokumen		DAU	
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	BPKAD Kota Pekalongan	1 kali		DAU	
5.2.2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	BPKAD Kota Pekalongan	4 dokumen	124.600.000	DAU	138.154.600
		Dokumen perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan	BPKAD Kota Pekalongan	2 dokumen		DAU	
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan	BPKAD Kota Pekalongan	1 kali		DAU	
5.2.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	91.250.000	DAU	26.000.000
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	BPKAD Kota Pekalongan	16 kali		DAU	
5.2.2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D		100 persen	267.740.000		262.900.000
5.2.2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan	BPKAD Kota Pekalongan	81 OPD	89.149.000	DAU	87.000.000
		Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan	BPKAD Kota Pekalongan	3 dokumen		DAU	
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kota Pekalongan	12 kali		DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	30 laporan	23.000.000	DAU	23.000.000
5.2.2.2.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai	BPKAD Kota Pekalongan	2 kali	25.000.000	DAU	25.000.000
5.2.2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	BPKAD Kota Pekalongan	3300 data SPT tahunan	73.591.000	DAU	70.900.000
		Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	BPKAD Kota Pekalongan	14 kali		DAU	
5.2.2.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun		1 dokumen	25.000.000		25.000.000
5.2.2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah		3 kali	32.000.000		32.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu		100 persen	415.544.000		395.288.400
5.2.2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan	BPKAD Kota Pekalongan	7 laporan	59.000.000	DAU	59.000.000
		Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD	BPKAD Kota Pekalongan	68 laporan		DAU	
5.2.2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	13 laporan	8.000.000	DAU	8.000.000
5.2.2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	7 laporan	95.000.000	DAU	95.000.000
		Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan	BPKAD Kota Pekalongan	5 kali		DAU	
5.2.2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	2 dokumen	90.000.000	DAU	90.000.000
		Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kota Pekalongan	1 kali		DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.2.03.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan MP TP-TGR yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	12 laporan	10.000.000	DAU	10.000.000
5.2.2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	1 dokumen	20.000.000	DAU	20.000.000
5.2.2.2.03.1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun		4 laporan	133.544.000		113.288.400
		Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan	BPKAD Kota Pekalongan	4 kali		DAU	
		Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan BLUD	BPKAD Kota Pekalongan	16 laporan		DAU	
5.2.2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos		100 persen	5.000.000.000		4.500.000.000
5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah bulan penyediaan dana BTT	BPKAD Kota Pekalongan	12 bulan	5.000.000.000	DAU	4.500.000.000
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)		100 persen	1.505.497.000		1.194.067.000
5.2.3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan		100 persen	1.505.497.000		1.194.067.000
5.2.3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku standar harga yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	2 buku	55.000.000	DAU	55.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	BPKAD Kota Pekalongan	2 buku	30.000.000	DAU	30.000.000
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	2 Dokumen		DAU	
5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pengajuan sertifikat	BPKAD Kota Pekalongan	250 bidang	455.000.000	DAU	155.000.000
5.2.3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	BPKAD Kota Pekalongan	3 jenis	65.000.000	DAU	65.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	3 Laporan		DAU	
5.2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat		1 unit	325.480.000		325.480.000
		Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala	BPKAD Kota Pekalongan	2 unit		DAU	
		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	BPKAD Kota Pekalongan	4 unit		DAU	
		Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	BPKAD Kota Pekalongan	5 kali		DAU	
5.2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan		80 laporan	575.017.000		563.587.000
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	80 Laporan		DAU	
		Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan	BPKAD Kota Pekalongan	80 OPD		DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan	BPKAD Kota Pekalongan	80 unit kerja		DAU	
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)		0,05 persen	2.162.950.000		1.560.916.000
5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak		4,7 persen	2.162.950.000		1.560.916.000
		Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola		100 persen			
5.2.4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	0 Dokumen	85.000.000	DAU	-
5.2.4.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Gebyar Pajak Daerah yang dilaksanakan	BPKAD Kota Pekalongan	2 kali	184.992.000	DAU	154.344.000
		Jumlah Laporan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	12 laporan		DAU	
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan pajak dan retribusi	BPKAD Kota Pekalongan	4 kali		DAU	
5.2.4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata	BPKAD Kota Pekalongan	1500 objek	30.000.000	DAU	30.000.000
		Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	BPKAD Kota Pekalongan	1140 objek		DAU	
5.2.4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan	BPKAD Kota Pekalongan	8 aplikasi	355.941.000	DAU	57.202.000
5.2.4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan	BPKAD Kota Pekalongan	2000 berkas	353.100.000	DAU	176.550.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Rencana Tahun 2024
			Lokasi	Targert Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun	BPKAD Kota Pekalongan	94 buku		DAU	
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021	BPKAD Kota Pekalongan	4 buku		DAU	
		Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate	BPKAD Kota Pekalongan	8000 objek		DAU	
5.2.4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan	BPKAD Kota Pekalongan	94000 lembar	300.000.000	DAU	300.000.000
		Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	BPKAD Kota Pekalongan	19000 lembar		DAU	
5.2.4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	BPKAD Kota Pekalongan	1 orang/ bulan	386.348.000	DAU	389.525.000
		Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani	BPKAD Kota Pekalongan	14400 WP/ WR		DAU	
5.2.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas BPHTB yang diteliti dan diverifikasi	BPKAD Kota Pekalongan	2000 berkas	65.388.000	DAU	66.114.000
5.2.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan	BPKAD Kota Pekalongan	3060 surat	227.681.000	DAU	227.681.000
5.2.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	BPKAD Kota Pekalongan	50 kali	159.500.000	DAU	159.500.000
		Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah	BPKAD Kota Pekalongan	8 wajib pajak		DAU	
5.2.4.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKAD Kota Pekalongan	0 Laporan	15.000.000	DAU	-

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan menetapkan sasaran di Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yaitu

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan, yaitu:

1. Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu
2. Ratio PAD
3. Nilai SAKIP OPD

Pencapaian sasaran ini tercemin dalam indikator-indikator kinerja dan target kinerja. Target capaian kinerja di tahun 2022 direncanakan dalam Renstra BPKAD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2023
1	2	3	4	6
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,32

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja 2023
1	2	3	4	6
3		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100
			Ratio PAD	1,98%
4		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	84,50

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan prioritas di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023. Kebutuhan pendanaan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.2	KEUANGAN	27.136.267.000	DAU
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.546.686.000	DAU
5.2.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	DAU
5.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	DAU
5.2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	DAU
5.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	DAU
5.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.846.334.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.2.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.709.084.000	DAU
5.2.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.000.000	DAU
5.2.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.250.000	DAU
5.2.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.500.000	DAU
5.2.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.500.000	DAU
5.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.868.000	DAU
5.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	DAU
5.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.868.000	DAU
5.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	DAU
5.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	DAU
5.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	DAU
5.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	DAU
5.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	DAU
5.2.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.455.000.000	DAU
5.2.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.200.000.000	DAU
5.2.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.000.000	DAU
5.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.736.000	DAU
5.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	DAU
5.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506.400.000	DAU
5.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.336.000	DAU
5.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.248.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.248.000	DAU
5.2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	DAU
5.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	DAU
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.921.134.000	DAU
5.2.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.237.850.000	DAU
5.2.2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	35.000.000	DAU
5.2.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	35.000.000	DAU
5.2.2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	62.000.000	DAU
5.2.2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	890.000.000	DAU
5.2.2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	124.600.000	DAU
5.2.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	91.250.000	DAU
5.2.2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	267.740.000	DAU
5.2.2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	89.149.000	DAU
5.2.2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	23.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.2.2.2.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	25.000.000	DAU
5.2.2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73.591.000	DAU
5.2.2.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	25.000.000	DAU
5.2.2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.000.000	DAU
5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	415.544.000	DAU
5.2.2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	59.000.000	DAU
5.2.2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.000.000	DAU
5.2.2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	95.000.000	DAU
5.2.2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	90.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.2.2.2.03.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10.000.000	DAU
5.2.2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	20.000.000	DAU
5.2.2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	133.544.000	DAU
5.2.2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000.000	DAU
5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	DAU
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.505.497.000	DAU
5.2.3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.505.497.000	DAU
5.2.3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga	55.000.000	DAU
5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.000.000	DAU
5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	455.000.000	DAU
5.2.3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	65.000.000	DAU
5.2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	325.480.000	DAU
5.2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	575.017.000	DAU
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.162.950.000	DAU
5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.162.950.000	DAU
5.2.4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	85.000.000	DAU
5.2.4.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	184.992.000	DAU
5.2.4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	30.000.000	DAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4
5.2.4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	355.941.000	DAU
5.2.4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	353.100.000	DAU
5.2.4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	300.000.000	DAU
5.2.4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	386.348.000	DAU
5.2.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	65.388.000	DAU
5.2.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	227.681.000	DAU
5.2.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	159.500.000	DAU
5.2.4.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	15.000.000	DAU

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan, serta dan sebagai panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023. Penyusunan Renja 2023 dilakukan setelah mempelajari visi, misi, dan program Pemerintah Kota Pekalongan sebagai muatan dan masukan dalam penyusunan visi, misi, strategi, kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan untuk satu tahun kedepan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan ini dapat menjadi sebagai acuan dan pedoman yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah serta menjadi dasar dan bahan untuk melakukan evaluasi dan guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Dengan demikian, diharapkan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini dapat menjadi pegangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kota Pekalongan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini masih memerlukan penyempurnaan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

Pekalongan, 3 Agustus 2022

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

